

IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh

Ni Nengah Selasih

nghselasih@gmail.com

Dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Bali Program Pascasarjana IHDN
Denpasar

Abstrak

Kurikulum pendidikan dasar, yakni suatu harapan tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional. Namun, kenyataan yang terjadi adalah perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negeri dan isu-isu mutakhir dari luar negeri yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum baru pada setiap jenjang pendidikan. Apalagi pendidikan dasar merupakan cikal bakal untuk menuju ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga diperlukan kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan.

Beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan kurikulum baru, yakni adanya peraturan perundang-undangan yang baru telah membawa implikasi terhadap paradigma pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah antara lain pembaharuan dan diversifikasi kurikulum, serta pembagian kewenangan pengembangan kurikulum. Perkembangan dan perubahan global dalam berbagai aspek kehidupan yang datang begitu cepat telah menjadi tantangan nasional dan menuntut perhatian segera dan serius. Kondisi masa sekarang dan kecenderungan di masa yang akan datang perlu dipersiapkan generasi muda termasuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang multidimensional.

Pengembangan kurikulum harus dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang mempunyai kemungkinan besar sudah dan/atau akan terjadi. Kurikulum yang dibutuhkan di masa depan adalah kurikulum yang mampu memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kesulitan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kurikulum secara berkelanjutan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Penyempurnaan kurikulum dilakukan secara responsif terhadap penerapan hak asasi manusia, kehidupan demokratis, persatuan, dan kesatuan, kepastian hukum, kehidupan beragama dan ketahanan budaya, pembangunan daerah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta pengelolaan lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi, Kurikulum Pendidikan Dasar, Tujuan Pendidikan Nasional

Abstract

Basic education curriculum that is a hope of achieving national education goals. But the reality of the matter is the development and changes in social life of nation and state in the country and current issues from abroad that can affect people's lives and Indonesia are the things that must be addressed and considered in the preparation of the new curriculum on every level of education. Especially basic education is the forerunner to go into higher education so that the necessary curriculum as a guideline in conducting education.

Some things underlying the preparation of the new curriculum namely a change in legislation either that the new paradigm has implications for curriculum development in primary and secondary education, among others renewal and diversification of the curriculum as well as curriculum development division of authority. Development and global changes in various aspects of life that comes so quickly has become a national challenge and requires immediate attention and present a serious condition and trends in future need to be prepared young people, including students who have competence multidimensional.

Curriculum development must be able to anticipate the problems that have likely already or will happen. Curriculum is needed in the future is a curriculum that can provide the skills and expertise to survive in a changing conflict uncertainty, uncertainty, and difficulties in life. Therefore, an enhanced curriculum on an ongoing basis to improve the quality of education nationwide. Curriculum improvement is done responsive to the application of human rights democratic life of unity and legal certainty of religious life and the resilience of Regional Development cultural development of science and information technology as well as environmental management.

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas dinyatakan bahwa "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang tinggi". Dalam upaya mencapai tujuan Pendidikan Nasional tersebut, maka disusunlah kurikulum Pendidikan Dasar dengan memperhatikan tingkat perkembangan siswa, kesesuaiannya dengan lingkungan dan kebutuhan pembangunan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ditinjau dari perkembangan kurikulum Pendidikan Dasar di Indonesia, nampak adanya kemajuan dan perkembangan, meskipun setapak demi setapak. Kemajuan dan perkembangan dimaksud sesuai dengan kebutuhan jaman, kalau kita pinjam istilah dalam ekonomi, maka kebutuhan jaman artinya sesuai dengan kebutuhan pasaran.

Perkembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar ini tidak akan berarti apa-apa tanpa didukung maupun ditunjang oleh pelaksana-pelaksana kurikulum itu sendiri. Kurikulum dan pelaksana kurikulum adalah komponen-komponen dari pendidikan yang merupakan suatu sistem. Pandangan kurikulum sebagai suatu sistem, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pendidikan itu merupakan satu keseluruhan yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam mengubah masukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menurut P.H. Coombs, ada 12 komponen utama dalam sistem pendidikan, yaitu (1) tujuan dan prioritas; (2) peserta didik; (3) manajemen; (4) struktur dan jadwal waktu; (5) isi dan bahan; (6) guru dan pelaksana; (7) alat bantu pelajaran; (8) fasilitas; (9) teknologi; (10) pengawasan mutu; (11) penelitian; (12) ongkos.

Dari dua belas komponen yang dikemukakan oleh P.H. Coombs tersebut di atas, masing-masing mempunyai hubungan fungsional antara yang satu dengan yang lain, apabila salah satu dari komponen tersebut mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi sistem itu sendiri.

B. Komponen-Komponen Dalam Sistem Pendidikan

1. Isi dan Bahan

Kurikulum 1994 Pola Wajib Belajar 9 tahun yang dilegitimasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Nomor: 060/V/1993 tanggal 23 Februari 1993, merupakan satu langkah maju dalam menentukan isi dan bahan pelajaran. Hal ini perlu mendapat sambutan, karena sebelum kurikulum ini diberlakukan, pasti telah dilakukan penelitian, pengkajian, dan penelaahan yang mendalam oleh para ahli di bidang pendidikan dan kurikulum.

Memahami isi dan bahan pelajaran, maka nampak kurikulum 1994 memiliki karakteristik keterbukaan. Dapat dilihat pada operasionalnya, pada isi dan bahan pelajaran pengembangannya tidak saja secara nasional, tetapi dipadukan dengan pengembangan bahan pelajaran yang bernuansa ke daerahan. Pada kurikulum sebelumnya yang bersifat nasional oriented, potensi yang ada di daerah diseragamkan secara nasional, tidak diberikan peluang untuk berkembang sesuai dengan warna kedaerahannya. Keterbukaan kurikulum 1994 yang tidak lagi “full nasional oriented” memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada di daerah. Hal ini mengandung maksud menjawab tantangan yang sedang bergulir, seperti lapangan kerja dan prediksi yang baik dalam mengatasi stock pengangguran yang kian menggunung. Sumber daya alam yang ada di daerah cukup banyak, namun belum dapat digali dan belum dapat pula dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum 2004, adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004 walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari Kurikulum 1994, perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem caturwulan. Sedangkan dalam kurikulum baru ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Dahulu pun, para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004

ini, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerja sama dan solidaritas, meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetisi. Jadi di sini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator, namun meski begitu pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek, namun subjek dan setiap kegiatan siswa ada nilainya. Mulai diberlakukan pula wajib pramuka sebagai nilai tambah ekstrakurikuler.

Sejak tahun ajaran 2006/2007, diberlakukan kurikulum baru yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang merupakan penyempurnaan Kurikulum 2004. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh, dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah di mulai tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar, dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006, dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL. Standar isi adalah ruang lingkup materi, dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat kerangka dasar, dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Pemberlakuan KTSP, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL, ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru, dan karyawan juga melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP, maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi, dan

kondisi lingkungan, dan kebutuhan masyarakat, yaitu untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Mengingat adanya keberagaman etnis, budaya, kemampuan, dan potensi daerah selama ini, belum terakomodir secara optimal dalam pengembangan kurikulum pendidikan nasional. Pada hal keberagaman tersebut, merupakan aset yang dapat dikembangkan menjadi nilai-nilai keunggulan nasional.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi 8 (delapan) standar, yaitu: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan. KTSP harus mengacu terutama pada 2 (dua) standar, yaitu Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Target yang ingin dicapai adalah setiap satuan pendidikan akan memiliki diferensiasi dan kreativitas pendidik yang dapat memacu kompetisi ke arah pendidikan Indonesia yang dapat lebih baik. Penyusunan KTSP didasarkan pada prinsip diversifikasi kurikulum. Masing – masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulumnya, dengan kekhasan sesuai keperluan satuan pendidikan, potensi daerah dan kondisi peserta didik.

Adanya hak bagi satuan pendidikan untuk dapat menyusun kurikulum masing – masing yang disesuaikan dengan ciri khas masing – masing. Kegiatan belajar mengajar lebih berpusat pada peserta didik mengembangkan kreativitas, menciptakan kondisi yang menyenangkan, menantang dan kontekstual. Melaksanakan penilaian kelas yang lebih efektif agar pencapaian kompetensi masing-masing peserta didik dapat diketahui dengan menggunakan berbagai cara, seperti kumpulan kerja siswa, hasil karya, penugasan, unjuk kerja, dan tes tertulis.

Pengelolaan kurikulum berbasis satuan pendidikan mengacu pada, Visi dan misi satuan pendidikan; mengembangkan perangkat kurikulum sendiri; pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lainnya; pemantauan dan penilaian untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan kualitas pelayanan terhadap peserta didik; kolaborasi horizontal dengan komite sekolah, organisasi profesi, dan sekolah lain; kolaborasi vertikal dengan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan.

Pada pertengahan semester tahun pelajaran 2014/2015 lalu kemendikbud Anies Baswedan, menghentikan sementara penerapan kurikulum 2013 dengan mengembalikan kepada kurikulum 2006 dengan beberapa pengecualian, yaitu sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 selama 3 semester tetap melaksanakan kurikulum 2013. Penghentian penerapan kurikulum ini dipacu dengan penilaian yang menyatakan bahwa penerapan kurikulum 2013 terlalu tergesa-gesa, sehingga menimbulkan berbagai kelemahan di berbagai sisi, antara lain pelatihan guru yang belum optimal, distribusi bahan ajar yang amburadul, pendekatan pembelajaran yang sulit diterapkan secara merata di semua sekolah, penilaian yang membebani dan konten bahan ajar yang masih mengandung beberapa unsur yang tidak layak.

Namun, semangat penyempurnaan kurikulum 2013 dengan melakukan pelatihan terhadap guru seakan lenyap begitu saja, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memberikan kejelasan terhadap implementasi kembali kurikulum yang telah dihentikan tersebut. Direktorat Jenderal Ketenagaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Unifah Rosyidi

mengakui pada tahun 2018 kurikulum 2013 (Kurtilas) akan diganti menjadi Kurikulum Nasional yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013, dengan catatan semua sekolah sudah menggunakan kurikulum 2013, akan tetapi kegiatan sosialisasi mengenai penerapan kurikulum ini belum dilakukan.\

Lahirnya Kurikulum Nasional tentunya dengan harapan yang besar akan meningkatkan kualitas pendidikan di Negeri ini, mennginagt Anies Baswedan adalah salah satu tokoh bangsa ini yang berhasil menggerakkan generasi muda untuk terlibat dalam dunia pendidikan dengan gerakan “Ayo Mengejar” yang telah digagasnya jauh sebelum menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja.

2. Guru dan Pelaksana

Tugas guru adalah mengajar, dan fungsinya adalah membantu terciptanya kesempatan belajar dan memperlancar tercapainya proses pendidikan yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum nasional bagi guru sesungguhnya tidak ada permasalahan yang mendasar. Sarana dan fasilitas yang tersedia sudah cukup memadai, tugas guru dapat berjalan dengan lancar, terciptanya kesempatan belajar tidak diragukan yang akhirnya tujuan yang ingin dicapai bukan merupakan impian kosong belaka. Namun, tugas dan fungsi guru dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum yang bernuansa kedaerahan belum sepenuhnya berjalan dan belum menunjang tercapainya tujuan kurikuler sebagaimana tuntutan mata pelajaran muatan lokal. Interaksi guru dengan murid ibaratnya jembatan yang terputus. Guru kehilangan kompas untuk mengarahkan peserta didik kepada tujuan yang hendak dicapai. Keadaan tersebut dikarenakan bahwa guru dihadapkan kepada masalah yang pelik dan paling mendasar, yaitu 1) penyebaran kurikulum yang belum menyentuh semua pengawas, guru dan kepala sekolah (terutama kurikulum muatan lokal); 2) sarana penunjang belajar siswa dan guru (khususnya buku pelajaran) masih belum sepenuhnya sempurna; 3) keterbatasan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum.

Agar guru termotivasi untuk mengembangkan kreativitasnya, maka sudah waktunya permasalahan segera dicarikan jalan pemecahannya. Pengawas dan kepala sekolah dapat memberikan pembinaan maupun bimbingan kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya, terutama untuk memberdayakan guru maupun tenaga kependidikan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

3. Alat Bantu Pelajaran

Dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran memerlukan alat bantu untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, yang dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, antara lain 1) sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan siswa sekolah dasar, yang nota bene belum mampu menangkap bahan pelajaran yang sifatnya masih abstrak secara optimal; 2) adanya perbedaan fungsi dan kepekaan organ yang dimiliki masing-masing peserta didik dalam menangkap dan mengolah masukan dari luar. Ada peserta didik dengan mudah menangkap dan mengolah masukan dari luar melalui audio, akan tetapi ada pula yang dengan mudah menangkap dan mengolah melalui visualisasi. Kemampuan peserta didik, yang jelas perlu dibantu dengan audiovisual, agar bahan pelajaran yang disajikan oleh guru dalam proses pembelajaran dapat diserap sebanyak-banyaknya oleh peserta didik.

Apabila dalam setiap proses pembelajaran senantiasa menggunakan ABP dengan optimal, maka kegiatan pembelajaran dimaksud dapat berjalan dengan lancar, interaksi guru dengan peserta didik berjalan dengan baik, tercipta pula suasana belajar yang kondusif, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan.

4. Fasilitas

Dalam membahas tentang fasilitas, maka ada 3 komponen yang secara mutlak harus ada, yaitu 1) pemberi fasilitas; 2) penerima fasilitas; 3) apa fasilitas itu. Fasilitas berupa kemudahan-kemudahan dalam pengadaan kebutuhan yang berhubungan kurikulum, seperti pengadaan buku pelajaran, pengadaan ABP, pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang tercapainya tujuan kurikulum dalam menuju pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.

Fasilitas pembinaan ketenagaan, seperti penataran dan pelatihan kepada semua jajaran kependidikan yang mendukung aktivitas pembelajaran, misalnya pengawas, kepala sekolah dan guru. Dengan demikian, guru mendapat bimbingan dari kepala sekolah dan kepala sekolah mendapat bimbingan dan pembinaan dari para pengawas. Terjadilah hubungan yang saling isi mengisi antara teknisi-teknisi di bidang pendidikan secara berjenjang.

Bagi penerima fasilitas, wajib memanfaatkan fasilitas yang diberikan dengan sebaik-baiknya, berikut dengan kewajiban untuk memelihara, menjaga, dan merawat agar fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh yang lainnya. Penerima fasilitas berupa pembekalan maupun pembinaan sebaiknya dipilih tenaga-tenaga yang mampu menularkan kepada yang lainnya. Penerima fasilitas itu seyogyanya lebih selektif, agar yang bersangkutan benar-benar menjadi nara sumber di tempat tugasnya masing-masing.

Jadi, pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, didalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan Kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri.

Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok : (1) prinsip – prinsip umum, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas; (2) prinsip-prinsip khusus, yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan

isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.

Kebudayaan nasional yang didukung oleh berbagai nilai kebudayaan daerah yang luhur dan beradab yang merupakan nilai jati diri yang menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan, baik dalam lapangan industri, kerajinan, industri rumah tangga, jasa pertanian (argo industri dan argo bisnis), perkebunan, perikanan perternakan, pertanian holtikultura, kepariwisataan, pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga terjadi kesesuaian, keselarasan, dan keseimbangan yang dinamis.

Kurikulum yang mangacu pada karakteristik peserta didik, perkembangan ilmu dan teknologi pada zamannya juga mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Penyusunan kurikulum atas dasar acuan keadaan masyarakat tersebut disebut “Kurikulum Muatan Lokal“. Kurikulum muatan lokal keberadaan di Indonesia telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987. Sedang pelaksanaannya telah dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987.

C. Kesimpulan

Beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan kurikulum baru antara lain: Adanya peraturan perundang-undangan yang baru telah membawa implikasi terhadap paradigma pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah antara lain pembaharuan dan diversifikasi kurikulum, serta pembagian kewenangan pengembangan kurikulum. Perkembangan dan perubahan global dalam berbagai aspek kehidupan yang datang begitu cepat telah menjadi tantangan nasional dan menuntut perhatian segera dan serius. Kondisi masa sekarang dan kecenderungan di masa yang akan datang perlu dipersiapkan generasi muda termasuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang multidimensional.

Pengembangan kurikulum harus dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang mempunyai kemungkinan besar sudah dan/atau akan terjadi. Kurikulum yang dibutuhkan di masa depan adalah kurikulum yang mampu memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kesulitan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kurikulum secara berkelanjutan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Penyempurnaan kurikulum dilakukan secara responsif terhadap penerapan hak asasi manusia, kehidupan demokratis, persatuan, dan kesatuan, kepastian hukum, kehidupan beragama dan ketahanan budaya, pembangunan daerah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta pengelolaan lingkungan. Kurikulum Berbasis Kompetensi ini sebenarnya memiliki justifikasi didaktis pedagogis yang kuat untuk menggantikan Kurikulum 1994, karena pendidikan dengan kurikulum 1994 ternyata tidak melahirkan unjuk kerja siswa secara bermakna. Siswa banyak tahu informasi, tetapi tidak bermakna bagi kehidupannya.

Jadi, kurikulum pendidikan dasar antara harapan dan kenyataan, yakni suatu harapan tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang tinggi. Namun, kenyataan yang terjadi adalah perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negeri dan isu-isu mutakhir dari luar negeri yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum baru pada setiap jenjang pendidikan.

Daftar Bacaan

- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kurikulum 2006 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kimia SMA dan MA, Jakarta
- Direktorat akademik dan direktorat jendral pendidikan tinggi, 2008, buku panduan pengembangan KBK, Jakarta
- Depdiknas. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Pelayanan Profesional Kurikulum 2004. Jakarta
- <http://PERBEDAAN-SECARA-SIGNIFIKAN-KURIKULUM-2004-KBK-KURIKULUM-2006-KTSP.html> di akses tanggal 29 september 2013
- <http://rijono.wordpress.com/2008/02/28/kurikulum-2004-kbk-kurikulum-2006-ktsp-memang-berbeda-secara-signifikan/> di akses tanggal 29 september 2013
- <http://wordpress.com/2008/04/29/aplikasi-kbk-dan-ktsp-sma> di akses tanggal 30 september 2013
- Mulyasa, 2009, Kurikulum Yang Disempurnakan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Selasih, N. N., & Sudarsana, I. K. (2018). Education Based on Ethnopedagogy in Maintaining and Conserving the Local Wisdom: A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(2), 293-306.
- Selasih, N. N. (2016). KAITAN PENDIDIKAN DAN KEPERIBADIAN MANUSIA DALAM MENCAPAI TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(1), 71-77.
- Smith, Andrew. 2000. Training and Development In Australia. Butterworths. Sydney
- Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. 2013. Kurikulum dan Pembelajaran. Rajawali Pers. PT Rajagrafindo Persada
- Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional